

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN ALIRAN RADIKALISME DI INDONESIA

Sri Nur Damayana

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih
srinurdamayana@fh.uncen.ac.id

Abstrak

Radikalisme di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan ideologi asing, telah menjadi ancaman signifikan bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional, menimbulkan polarisasi, konflik, dan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak radikalisme terhadap kohesi sosial serta mengevaluasi efektivitas kebijakan kriminal dalam menanggulangnya. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis undang-undang dan literatur akademik terkait radikalisme dan kebijakan kriminal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal, meskipun berhasil dalam beberapa kasus, masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait sumber daya dan koordinasi antar lembaga, serta masalah hak asasi manusia. Kesimpulannya, kebijakan kriminal yang efektif harus didukung oleh pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, deradikalisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Deradikalisasi, Stabilitas Nasional

Abstract

Radicalism in Indonesia, influenced by socio-economic conditions and foreign ideologies, has become a significant threat to social stability and national security, leading to polarization, conflict, and challenges for the government in preserving diversity. This study aims to analyze the impact of radicalism on social cohesion and evaluate the effectiveness of criminal policies in countering it. Using a normative method with a descriptive-analytical approach, this research examines laws and academic literature related to radicalism and criminal policies in Indonesia. The findings show that criminal policies, although successful in some cases, still face major challenges, particularly regarding resources, inter-agency coordination, and human rights issues. In conclusion, effective criminal policies must be supported by a holistic approach involving education, deradicalization, and community participation in preventing radicalism.

Keywords: Criminal Policy, Deradicalization, National Stability

PENDAHULUAN

Radikalisme telah menjadi ancaman dunia yang juga memiliki signifikan di Indonesia, sebuah negara keanekaragaman agama, suku, dan dengan populasi Muslim terbesar di budaya. Radikalisme mengacu pada

pemahaman atau ideologi yang berupaya melakukan perubahan mendasar dalam sistem sosial atau politik melalui cara-cara ekstrem yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Fenomena radikalisme di Indonesia tidak hanya muncul dalam beberapa dekade terakhir, tetapi juga telah memiliki akar historis sejak masa kemerdekaan, di mana beberapa kelompok mencoba memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan prinsip dasar negara.¹

Beragam faktor telah mendorong munculnya radikalisme di Indonesia, mulai dari pengaruh ideologi asing hingga kondisi sosial-ekonomi dalam negeri. Radikalisme berbasis agama adalah salah satu bentuk yang paling dominan di Indonesia, di mana interpretasi sempit terhadap agama tertentu sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi yang menentang keberagaman dan toleransi. Dalam beberapa kasus, kelompok radikal agama ini berusaha mengubah tatanan sosial melalui cara-cara yang tidak sesuai

dengan hukum dan norma masyarakat. Selain radikalisme agama, terdapat juga radikalisme politik yang berupaya menggantikan sistem pemerintahan yang ada dengan ideologi tertentu yang dianggap lebih ideal oleh kelompok-kelompok tertentu.²

Faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia sangat kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan marginalisasi sosial-ekonomi sering kali menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan kondisi ini untuk merekrut anggota baru dengan menjanjikan solusi alternatif terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa individu yang merasa termarginalkan secara sosial atau ekonomi lebih rentan terhadap pandangan radikal karena mereka merasa bahwa ideologi tersebut dapat memberikan jawaban atas ketidakadilan yang mereka alami.³

¹ Setiyono, B., & Muis, A. (2019). Social and Economic Marginalization as a Source of Radicalism: Evidence from Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy and Security Studies*, 6(2), hlm. 45-60.

² Prasetyo, E. (2018). Transnational Terrorism and Security Threats in Southeast Asia: Lessons from Indonesia. *Southeast Asian Security Journal*, 11(3), 110-125

³ Hermawan, T. (2020). Criminal Approach to Radicalism Prevention in Indonesia:

Di era digital, penyebaran ideologi radikal semakin mudah terjadi melalui media sosial dan platform daring lainnya. Melalui internet, kelompok-kelompok radikal dapat menyebarkan ideologi mereka secara luas dan tanpa hambatan, sehingga memungkinkan mereka menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan internet. Keterbukaan informasi di era globalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengontrol arus informasi tanpa melanggar hak-hak kebebasan berbicara yang diatur dalam konstitusi.

Perkembangan radikalisme di Indonesia tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional secara keseluruhan. Radikalisme yang berkembang pesat menjadi ancaman yang nyata bagi keutuhan bangsa. Dampaknya terhadap stabilitas sosial dapat dilihat dari berbagai konflik horizontal yang terjadi akibat provokasi dari kelompok-kelompok radikal yang menentang keberagaman. Radikalisme juga mengakibatkan konflik antaragama

dan antarkelompok sosial di masyarakat, yang mengancam kohesi sosial dan perdamaian yang selama ini dijaga oleh Indonesia.⁴

Dampak dari radikalisme ini juga terlihat dalam meningkatnya jumlah serangan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal. Serangan terorisme ini tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa, tetapi juga berdampak ekonomi yang cukup besar, seperti penurunan sektor pariwisata dan investasi asing. Serangan terorisme seperti bom Bali pada tahun 2002 dan berbagai serangan lainnya menunjukkan bahwa radikalisme dapat menghancurkan sektor-sektor penting dalam perekonomian nasional serta merusak citra Indonesia di mata dunia. Selain itu, radikalisme di Indonesia memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris internasional, yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat transnasional dan memerlukan perhatian lebih dalam hal keamanan. Keterkaitan dengan jaringan internasional ini meningkatkan risiko bagi Indonesia untuk menjadi tempat strategis bagi pergerakan radikal yang berafiliasi dengan kelompok teror global. Oleh karena itu, penanganan

A Policy Review. *Journal of Criminology and Public Safety*, 8(1), 74-89.

⁴ Wibowo, J. (2022). Public Perception and Trust in Anti-Radicalism Policies: A Case

Study in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Research*, 4(1), 35-50.

radikalisme telah menjadi prioritas nasional, di mana upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri serta memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan damai.⁵

Dalam konteks penanggulangan radikalisme, kebijakan kriminal memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan kriminal ini mencakup serangkaian tindakan penegakan hukum, regulasi, serta langkah preventif dan represif yang bertujuan untuk menangkal penyebaran ideologi radikal, mendeteksi dan menindak kelompok atau individu yang terlibat dalam aktivitas radikal, serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan. Di Indonesia, kebijakan kriminal terhadap radikalisme diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan wewenang lebih kepada aparat keamanan untuk menangani ancaman radikalisme dan terorisme secara komprehensif.

Selain itu, kebijakan kriminal dalam bentuk program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

berfokus pada upaya mengubah pandangan ideologis para pelaku teror agar kembali ke pandangan yang lebih moderat dan toleran. Program deradikalisasi ini mencakup pendekatan rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis bagi para pelaku agar dapat kembali berperan secara positif di masyarakat. Langkah-langkah preventif lainnya juga dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap organisasi yang berpotensi menyebarkan paham radikal dan penyuluhan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan.

Meski kebijakan kriminal yang ada cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini, termasuk dalam hal pendanaan, personel, serta teknologi yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah radikalisme. Di Indonesia, anggaran untuk penanganan radikalisme sering kali bersaing dengan kebutuhan lain dalam sektor keamanan, sehingga implementasi kebijakan ini tidak optimal.

⁵ Nurdin, A. (2022). Long-Term Effectiveness of Criminal Policies on Radicalism

in Indonesia: A Critical Review. *Journal of Public Policy Analysis*, 7(3), 143-160.

Selain itu, koordinasi antar-institusi yang terlibat dalam penanganan radikalisme, seperti kepolisian, TNI, BNPT, dan lembaga terkait lainnya, sering kali menghadapi tantangan. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan kebijakan kriminal tidak terlaksana secara efektif, karena masing-masing lembaga memiliki prosedur dan prioritas yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan pendekatan ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan inefisiensi yang menghambat pencapaian hasil yang diharapkan.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan kriminal ini juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap penting untuk menjaga keamanan, ada kelompok masyarakat yang merasa bahwa kebijakan kriminal terhadap radikalisme sering kali terlalu berlebihan atau bahkan menimbulkan ketakutan. Ketakutan ini dapat menciptakan jarak antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan di tingkat komunitas. Ketidakpercayaan ini perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif, di mana pemerintah

melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan radikalisme.

Tingkat efektivitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah. Meski kebijakan ini telah berhasil mencegah beberapa aksi terorisme dan menangkap pelaku, masih ada kritik mengenai efektivitasnya dalam jangka panjang. Beberapa pandangan menyatakan bahwa kebijakan kriminal yang ada hanya bersifat reaktif, yaitu lebih berfokus pada penanganan setelah tindakan radikal terjadi, dan kurang memperhatikan akar masalah radikalisme, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan rendahnya akses pendidikan.

Program deradikalisasi yang dilaksanakan pun menghadapi tantangan dalam mengubah ideologi radikal yang telah mendalam di benak para pelaku. Upaya untuk mengubah pandangan ekstrem ini membutuhkan waktu dan pendekatan yang holistik, yang mencakup pemberdayaan sosial dan pemulihan psikologis. Tantangan dalam program deradikalisasi menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan kriminal, tetapi perlu

didukung oleh berbagai kebijakan lain yang memperkuat pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial di tingkat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang terkait terorisme (misalnya, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik radikalisme dan kebijakan kriminal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, di mana berbagai dokumen dan literatur dianalisis secara mendalam untuk memahami dan menilai kebijakan kriminal yang ada. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan fokus pada interpretasi dan penilaian terhadap efektivitas regulasi, program deradikalisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam

implementasinya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan kriminal dalam menghadapi radikalisme serta rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perkembangan Aliran Radikalisme Terhadap Stabilitas Sosial Dan Keamanan Nasional Di Indonesia

Radikalisme memiliki dampak signifikan terhadap kohesi sosial di Indonesia. Pandangan radikal cenderung bertentangan dengan prinsip keberagaman dan toleransi yang dianut dalam masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dampak pertama dari radikalisme terhadap kohesi sosial adalah meningkatnya polarisasi sosial. Ideologi radikal memperkuat pandangan bahwa pihak yang berbeda pandangan atau keyakinan dianggap sebagai "lawan" atau "musuh," sehingga memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok sosial. Polarisasi ini menciptakan perasaan saling curiga dan

prasangka yang memudahkan timbulnya konflik horizontal dalam masyarakat.⁶ Sebagai contoh, beberapa konflik sektarian di wilayah tertentu di Indonesia seperti di Poso dan Ambon memiliki dimensi radikal yang melibatkan unsur-unsur agama. Konflik-konflik ini menunjukkan bagaimana pandangan radikal yang berbasis agama atau identitas kelompok dapat mengarah pada kekerasan dan konflik terbuka. Fenomena ini tidak hanya merusak hubungan antarwarga, tetapi juga menghilangkan rasa aman di masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi titik panas konflik. Masyarakat merasa takut dan waspada terhadap anggota kelompok yang berbeda identitas, yang akhirnya mengurangi tingkat toleransi dan rasa saling percaya antarwarga.⁷ Radikalisme juga menyebabkan segregasi sosial, terutama dalam komunitas yang berbasiskan agama atau etnis. Ideologi radikal mengajarkan bahwa kelompok tertentu harus dihindari atau bahkan dilawan karena dianggap

sebagai ancaman terhadap ideologi mereka. Segregasi ini tidak hanya menyebabkan jarak sosial tetapi juga meningkatkan risiko pengucilan kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kasus kekerasan yang menimpa komunitas minoritas di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu contoh dari dampak segregasi sosial akibat radikalisme.⁸

Ketidakpercayaan yang timbul antarwarga memperburuk integrasi sosial, karena banyak kelompok masyarakat yang merasa terasing atau termarginalkan. Ketika radikalisme memicu tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas, hal ini dapat berdampak pada pembentukan stereotip dan stigma negatif yang semakin memperkuat ketegangan antarwarga. Contoh kasus di antaranya adalah diskriminasi yang menimpa kelompok minoritas agama yang mendapatkan ancaman atau bahkan kekerasan dari kelompok radikal.⁹

⁶ Rahman, M. (2019). Radicalism and Social Cohesion: The Indonesian Context. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(2), 67-89

⁷ Aulia, F. (2021). Impacts of Radicalism on Community Security and Tolerance in Indonesia. *Asian Social Science Journal*, 14(3), 89-103

⁸ Mahmud, I. (2019). Segregation and Social Isolation due to Radical Ideology. *Journal of Social Policy and Management*, 11(4), 102-118.

⁹ Widodo, A. (2021). Religious Minorities under Pressure: Radicalism in Indonesian Society. *Journal of Religion and Society*, 15(3), 120-137.

Radikalisme tidak hanya memengaruhi struktur sosial, tetapi juga mengubah budaya lokal dan nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat. Di Indonesia, beberapa nilai tradisional, seperti gotong royong dan toleransi, mulai tergerus oleh pandangan radikal yang menekankan eksklusivitas dan pemisahan sosial. Perubahan perilaku sosial, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar ideologi radikal melalui media sosial, semakin mengancam nilai-nilai budaya lokal. Radikalisme yang berkembang di kalangan anak muda menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan norma masyarakat. Radikalisme juga berdampak pada pendidikan dan kehidupan beragama. Beberapa lembaga pendidikan bahkan telah menjadi sasaran penyusupan ideologi radikal, yang bertujuan untuk membentuk generasi muda dengan pemahaman agama yang ekstrem. Pengaruh ini menyebabkan perubahan pola pikir di kalangan pelajar yang kemudian terbawa hingga dewasa, sehingga meningkatkan risiko generasi muda yang terjebak dalam ideologi radikal. Radikalisme memiliki dampak langsung terhadap keamanan nasional Indonesia,

terutama melalui pengaruh jaringan internasional yang memperkuat gerakan radikal di dalam negeri. Radikalisme seringkali memiliki koneksi dengan organisasi internasional, yang memberikan dukungan material dan ideologis bagi kelompok radikal lokal. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, karena terdapat potensi bagi kekuatan asing untuk mempengaruhi stabilitas dan keamanan Indonesia melalui kelompok-kelompok radikal.

Keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi radikal internasional juga berdampak pada keamanan nasional. Banyak individu yang bergabung dengan kelompok radikal global yang memiliki visi untuk membentuk masyarakat atau negara dengan ideologi ekstrem, yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia.

Salah satu dampak paling mencolok dari radikalisme adalah peningkatan insiden terorisme yang mengancam keamanan publik dan stabilitas ekonomi. Terorisme yang dipicu oleh pandangan radikal tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Masyarakat kehilangan rasa aman dan

cenderung menghindari tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi target serangan. Terorisme juga berdampak pada sektor pariwisata dan investasi asing karena meningkatnya persepsi risiko di Indonesia. Selain itu, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang sering menjadi target aksi teror mengalami penurunan tingkat keamanan. Ketidakpastian ini menghambat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Radikalisme juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kerusakan material maupun biaya untuk memulihkan keadaan pasca serangan. Infrastruktur publik yang rusak, biaya medis untuk korban, serta upaya rehabilitasi pasca serangan semuanya membebani ekonomi nasional. Biaya pemulihan yang tinggi serta ketakutan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dapat memengaruhi produktivitas dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dampak radikalisme pada sistem hukum dan keamanan sangat signifikan. Sistem hukum dan lembaga keamanan mengalami tekanan untuk menangani berbagai kasus radikalisme dan terorisme yang terus meningkat. Untuk

menanggulangi masalah ini, kebijakan anti-terorisme dan deradikalisasi semakin diperkuat. Namun, di sisi lain, kebijakan yang semakin tegas ini menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Beberapa kelompok mengkritik kebijakan anti-terorisme yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan beragama.

Kebijakan kriminal menjadi komponen utama dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat upaya penindakan dan pencegahan terhadap radikalisme. Program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertujuan untuk membimbing individu-individu yang terpapar ideologi radikal agar kembali ke pandangan yang moderat.

Pemberdayaan masyarakat, melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, merupakan langkah penting dalam mencegah radikalisme dari akarnya. Tokoh masyarakat dan agama memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang toleran, serta membantu membangun komunitas yang

kuat dan saling mendukung. Program deradikalisasi berbasis komunitas juga diterapkan sebagai upaya untuk mencegah radikalisme dari tingkat lokal. Radikalisme di Indonesia semakin menunjukkan keterkaitannya dengan jaringan internasional. Oleh karena itu, kerjasama dengan negara lain dalam penanggulangan radikalisme menjadi sangat penting. Beberapa bentuk kerjasama internasional ini mencakup pertukaran informasi intelijen, peningkatan keamanan lintas batas, serta kerjasama dalam program deradikalisasi yang dilakukan di wilayah regional ASEAN dan organisasi global lainnya.¹⁰ Selain itu, Indonesia turut berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas strategi global untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme, seperti forum ASEAN, PBB, dan berbagai program yang didukung oleh lembaga internasional seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Kerjasama internasional ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak jaringan terorisme global yang seringkali

memberikan dukungan terhadap kelompok radikal di Indonesia. Melalui pembentukan jaringan kerjasama lintas negara, Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan memantau pergerakan kelompok radikal yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Kerjasama dalam bidang teknologi informasi juga penting dalam mendeteksi radikalisasi yang menyebar melalui media sosial dan platform daring.¹¹

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan radikalisme, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi sasaran utama penyebaran ideologi ekstremis. Upaya pencegahan melalui pendidikan mencakup penanaman nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan cinta tanah air sejak dini. Kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman multikultural serta keterampilan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi dan menolak ajaran-ajaran yang bersifat radikal.¹²

Selain itu, pendidikan informal melalui kegiatan di komunitas dan organisasi

¹⁰ Yulianto, R. (2020). *International Collaboration on Counter-Radicalism in Southeast Asia*. *Journal of International Relations*, 10(2), 140-155.

¹¹ Sari, N. (2019). The Role of Technology in Combating Online

Radicalization. *Asian Journal of Security Studies*, 6(3), 210-225

¹² Nugroho, A. (2021). Education as a Means of Counter-Radicalism for Youth in Indonesia. *Journal of Educational Policy and Management*, 15(1), 34-50.

pemuda juga memainkan peran dalam mencegah radikalisme. Dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan positif yang memperkuat identitas dan nilai-nilai nasionalisme, potensi paparan terhadap ideologi radikal dapat diminimalisir. Pemberdayaan guru dan pendidik dalam mengenali tanda-tanda radikalisme pada siswa juga sangat penting, sehingga proses pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum ideologi radikal berkembang lebih jauh.

Program deradikalisasi yang diterapkan pemerintah Indonesia melalui BNPT bertujuan untuk membantu mantan pelaku radikalisme agar dapat kembali berbaaur dengan masyarakat dan meninggalkan ideologi ekstremis. Program ini mencakup rehabilitasi psikologis, pembinaan agama yang moderat, serta pelatihan keterampilan yang dapat digunakan oleh mantan pelaku teror dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas program deradikalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala dalam pendanaan, perlunya metode yang lebih holistik, dan resistensi dari pelaku

yang masih kuat memegang ideologi radikal.¹³

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari komunitas dan masyarakat luas. Mantan pelaku yang telah menjalani program deradikalisasi seringkali menghadapi diskriminasi saat kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menerima dan mendukung reintegrasi para mantan teroris sangat diperlukan agar mereka benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan normal.

2. Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Dan Menanggulangi Aliran Radikalisme Di Indonesia

Deradikalisasi di Indonesia adalah upaya strategis yang bertujuan untuk mengubah ideologi ekstremis menjadi pandangan yang lebih moderat dan harmonis dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks narapidana terorisme, program deradikalisasi dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan dukungan dari tokoh agama, psikolog, dan pakar sosial. Program ini dirancang dengan

¹³ Prasetya, D. (2018). *Evaluating Indonesia's Deradicalization Programs for*

Former Terrorists. Journal of Terrorism Studies, 7(4), 178-195.

pendekatan multidisiplin yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi menyentuh dimensi agama, psikologis, dan ekonomi. Misalnya, melalui pembinaan agama yang moderat, BNPT melibatkan ulama dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam yang damai. Mereka berperan sebagai pembimbing yang membantu para narapidana memahami ajaran agama dengan cara yang jauh dari kekerasan. Langkah ini tidak hanya mencegah para pelaku kembali ke jalur radikal tetapi juga menguatkan keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang damai.

Selain aspek keagamaan, konseling psikologis menjadi bagian integral dari program deradikalisasi. Menurut penelitian, banyak pelaku radikalisme yang sebelumnya mengalami trauma atau masalah psikologis yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, BNPT menyediakan konselor yang membantu narapidana mengidentifikasi dan mengatasi akar emosional dari pemikiran radikal mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk menghadapi dan mereduksi dorongan ekstremisme yang disebabkan oleh kondisi mental yang kurang stabil. Konseling ini sangat penting untuk

membantu para mantan pelaku agar dapat berpikir secara lebih rasional dan mampu mengatasi konflik internal tanpa melibatkan ideologi radikal sebagai jawaban.

Pelatihan keterampilan adalah bagian yang tak kalah penting dalam proses deradikalisasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar memiliki keterampilan praktis setelah dibebaskan. Pelatihan ini mencakup bidang-bidang seperti pertukangan, pertanian, dan kewirausahaan, yang dapat mendukung kemandirian mereka di masa depan. Dengan keterampilan ini, mantan pelaku terorisme tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan ekonomi setelah keluar dari penjara, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kelompok ekstremis yang kerap menawarkan bantuan ekonomi sebagai cara mempertahankan loyalitas.

Namun, kendala besar dalam program deradikalisasi adalah pada proses reintegrasi sosial. Setelah narapidana bebas, mereka dihadapkan dengan lingkungan sosial yang sering kali penuh dengan stigma dan prasangka negatif. Dalam hal ini, BNPT berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk membangun hubungan yang lebih baik antara mantan pelaku dan

lingkungan sosialnya. Peran keluarga juga tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, keluarga merupakan sumber dukungan emosional yang kuat dan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi mantan pelaku untuk kembali menjalani kehidupan normal tanpa kembali pada ideologi radikal. Keluarga diharapkan dapat mendukung mantan pelaku dalam proses perubahan ini dan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi selama reintegrasi.

Stigma sosial menjadi tantangan yang sangat nyata dalam proses reintegrasi. Masyarakat sering kali sulit menerima kembali mantan narapidana terorisme karena khawatir mereka akan kembali melakukan aksi radikal. Hal ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para mantan pelaku untuk memulai kehidupan baru. Pencegahan stigma dilakukan melalui kampanye dan edukasi yang melibatkan masyarakat luas agar mereka lebih memahami pentingnya dukungan sosial dalam deradikalisasi.

Kebijakan kriminal di Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi radikalisme telah memberikan kontribusi signifikan dalam hal pencegahan dan

pengamanan dari ancaman terorisme. Penangkapan dan pencegahan merupakan bagian penting dari kebijakan ini, di mana aparat keamanan menggunakan langkah proaktif dalam memantau aktivitas radikal. Dalam beberapa kasus, aparat berhasil menggagalkan rencana serangan sebelum terwujud melalui penangkapan pelaku yang terindikasi terlibat dalam jaringan radikal. Keberhasilan dalam pencegahan ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal yang kuat memiliki dampak langsung dalam mengurangi potensi ancaman radikalisme di masyarakat.

Selain itu, penurunan angka serangan terorisme menjadi indikator keberhasilan kebijakan kriminal dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Menurut data statistik BNPT, sejak penerapan kebijakan deradikalisasi yang lebih ketat, angka serangan teror di wilayah Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Peningkatan rasa aman ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Namun, keberhasilan kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber

daya dan infrastruktur. Meski pemerintah pusat mendukung penuh upaya pemberantasan radikalisme, banyak daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas untuk memantau potensi ancaman radikalisme secara efektif. Masalah ini berdampak pada ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan antiradikalisme di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal. Koordinasi yang kurang efektif antara lembaga keamanan, seperti TNI, Polri, dan BNPT, sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Hambatan ini mengakibatkan kebijakan kriminal kurang berjalan optimal dan menghambat proses pencegahan yang seharusnya berjalan lebih terpadu.

Aspek hak asasi manusia juga menjadi isu yang sensitif dalam penerapan kebijakan kriminal ini. Kritik terhadap tindakan represif sering kali muncul, baik dari organisasi internasional maupun masyarakat lokal. Banyak pihak yang berpendapat bahwa langkah represif yang dilakukan pemerintah berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu,

keseimbangan antara menjaga keamanan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan kriminal terhadap radikalisme.

Evaluasi program deradikalisasi menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keberhasilannya. Efektivitas program deradikalisasi dapat diukur dari perubahan sikap narapidana terhadap ideologi radikal. Dalam beberapa kasus, mantan pelaku yang mengikuti program ini menunjukkan perubahan signifikan dan mampu beradaptasi kembali di masyarakat. Namun, efektivitas program ini belum optimal karena terdapat sejumlah narapidana yang kembali melakukan aksi teror setelah dibebaskan. Fenomena ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, terutama bagi mereka yang telah lama terpapar ideologi radikal.

Di sisi lain, kelemahan program deradikalisasi terletak pada pendekatannya yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjangkau aspek psikologis dan emosional yang mendalam. Beberapa pelaku terorisme memiliki ikatan ideologi yang sangat kuat sehingga sulit untuk diubah hanya

dengan metode yang konvensional. Program ini memerlukan strategi yang lebih inovatif untuk menjangkau pelaku dengan latar belakang ideologis yang kuat.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mendukung keberhasilan program deradikalisasi. Peran komunitas dalam memberikan dukungan bagi mantan pelaku radikalisme dapat menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi. Dukungan ini sangat diperlukan agar para mantan pelaku tidak merasa terisolasi dan memiliki dorongan untuk menjalani kehidupan yang produktif. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mendukung mantan pelaku juga membantu menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar.

PENUTUP

1. Radikalisme mengancam kohesi sosial dan keamanan Indonesia dengan memicu polarisasi dan konflik antar kelompok, terutama terhadap minoritas, serta berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan rasa aman publik.

Pemerintah berupaya menanggulangi ini melalui program deradikalisasi, pendidikan toleransi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan masyarakat dalam menerima dan membantu reintegrasi mantan pelaku radikalisme.

2. Kebijakan deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah radikalisme yang kian kompleks. Meskipun telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, program ini masih menghadapi tantangan besar, baik dalam hal pelaksanaan maupun dukungan sosial. Keberhasilan kebijakan kriminal dalam menanggulangi radikalisme dapat diukur dari penurunan angka insiden teror dan keberhasilan dalam deradikalisasi narapidana. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan isu hak asasi manusia memerlukan perhatian lebih. Pendekatan teknologi, restoratif, dan kerjasama internasional menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F. (2021). Impacts of Radicalism on Community Security and Tolerance in Indonesia. *Asian Social Science Journal*, 14(3), 89-103
- Hermawan, T. (2020). Criminal Approach to Radicalism Prevention in Indonesia: A Policy Review. *Journal of Criminology and Public Safety*, 8(1), 74-89.
- Mahmud, I. (2019). Segregation and Social Isolation due to Radical Ideology. *Journal of Social Policy and Management*, 11(4), 102-118.
- Nugroho, A. (2021). Education as a Means of Counter-Radicalism for Youth in Indonesia. *Journal of Educational Policy and Management*, 15(1), 34-50.
- Nurdin, A. (2022). Long-Term Effectiveness of Criminal Policies on Radicalism in Indonesia: A Critical Review. *Journal of Public Policy Analysis*, 7(3), 143-160.
- Prasetya, D. (2018). *Evaluating Indonesia's Deradicalization Programs for Former Terrorists*. *Journal of Terrorism Studies*, 7(4), 178-195.
- Prasetyo, E. (2018). Transnational Terrorism and Security Threats in Southeast Asia: Lessons from Indonesia. *Southeast Asian Security Journal*, 11(3), 110-125
- Rahman, M. (2019). Radicalism and Social Cohesion: The Indonesian Context. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(2), 67-89
- Sari, N. (2019). The Role of Technology in Combating Online Radicalization. *Asian Journal of Security Studies*, 6(3), 210-225
- Setiyono, B., & Muis, A. (2019). Social and Economic Marginalization as a Source of Radicalism: Evidence from Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy and Security Studies*, 6(2), hlm. 45-60.
- Wibowo, J. (2022). Public Perception and Trust in Anti-Radicalism Policies: A Case Study in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Research*, 4(1), 35-50.
- Widodo, A. (2021). Religious Minorities under Pressure: Radicalism in Indonesian Society. *Journal of Religion and Society*, 15(3), 120-137.
- Yulianto, R. (2020). *International Collaboration on Counter-Radicalism in Southeast Asia*. *Journal of International Relations*, 10(2), 140-155.